

.....
**IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SOASIO KECAMATAN TIDORE
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Oleh

Maimuna Syaifuddin¹, Abdul Kadir Ali², Yusuf Kamis³

^{1,2,3}Universitas Nuku Tidore

Email: [1maimunasyaifuddin@gmail.com](mailto:maimunasyaifuddin@gmail.com)

Abstract

Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendistribusikan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dan kendala yang dihadapi di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara langsung pada informan penelitian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPNT di Kelurahan Soasio berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena masih ada perbaikan data KPM yang belum tepat sasaran, ketepatan waktu pencairan yang perlu ditingkatkan, dan gangguan teknis pada E-warong seperti kehabisan stok dan gangguan jaringan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai

PENDAHULUAN

Menurut Hidayat (2022), kemiskinan adalah masalah utama yang berdampak langsung pada keberlanjutan hidup manusia. Kemiskinan sering diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang cukup, pakaian yang layak dan lain-lain.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih di bawah rata-rata. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki keahlian khusus karena kurangnya pendidikan atau pelatihan tertentu dan pengalaman yang terbatas. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM di Indonesia sehingga pemerintah menjalankan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak mampu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Djaenal, dkk. (2021) menyatakan bahwa usaha untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

melainkan juga tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan program-program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, serta Program BPNT.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Sosial telah melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyediakan bantuan sosial dan subsidi secara non tunai. Hal ini bertujuan untuk mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan meningkatkan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung.

Berdasarkan observasi awal di lapangan oleh penulis, terdapat 39 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Soasio pada tahun 2021 yang tersebar di semua RT. Jumlah ini sama dengan tahun 2020 dan menunjukkan bahwa program BPNT belum sepenuhnya berhasil dalam menuntaskan kemiskinan karena belum tepat sasaran dan data KPM tidak akurat. Namun, penyaluran BPNT saat ini memberikan dampak positif karena mudah dan memberikan banyak pilihan serta kendali bagi KPM.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.

KAJIAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Mulyadi (2015), implementasi adalah proses tindakan administratif yang dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Sedangkan Tahir (2014) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok

pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Nugroho (2014), implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Selanjutnya implementasi sebagai proses menyeluruh dari tindakan administratif yang dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan penjabaran keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui birokrasi tetapi juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Hamdi (2014), literatur mengenai implementasi kebijakan terbagi menjadi dua kelompok: pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dan memusatkan perhatian pada faktor-faktor makro yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral. Pendekatan *bottom-up* menekankan pada kelompok sasaran dan penyedia layanan serta berfokus pada variabel mikro. Ada juga kelompok ketiga yang mencoba menyatukan kedua pendekatan tersebut dengan fokus pada aspek ambiguitas dan konflik dalam implementasi kebijakan

Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut Akmal (2020), pemerintah memberikan bantuan pangan setiap bulan kepada KPM melalui akun elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH atau pedagang bahan pangan yang bermitra dengan Bank Himbara. Program BPNT bertujuan untuk menghemat pengeluaran dan meningkatkan nutrisi KPM dengan cara yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan Permensos No. 20 tahun 2019, BPNT adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada KPM setiap bulan secara Nontunai melalui akun elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warong atau pedagang bahan pangan yang bermitra dengan Bank

Penyalur. Sementara E-warong adalah tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan agen bank, pedagang atau pihak lain. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada KPM secara non tunai. Sedangkan KKS adalah alat pembayaran elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan BPNT.

Sasaran Penerima Manfaat Program BPNT

Menurut PermenSos No.20 Tahun 2019, BPNT diberikan kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan atau KPM BPNT, yang namanya terdaftar dalam DPM BPNT dan ditunjuk oleh Kemensos. DPM BPNT berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. DPM BPNT yang telah disetujui oleh Pemda dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kemensos melalui aplikasi SIKS-NG pada menu BSP.

METODE PENELITIAN

Fokus dan ruang lingkup pada penelitian ini yaitu Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kelurahan Soasio yang mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT).

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki kenyataan yang ada tanpa melakukan manipulasi, seperti yang dilakukan pada deskriptif sederhana. (Baharuddin & Yusuf, 2021).

Sementara data yang penulis cantumkan berupa data primer dan data sekunder yang mana dalam Teknik pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, atau kombinasi dari keempatnya.

Secara umum ada empat jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan, atau triangulasi.

Selanjutnya untuk Teknik analisis data penulis menggunakan konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020), menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara kontinu sampai selesai, sehingga datanya sudah cukup. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Soasio merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Tidore, kota Tidore Kepulauan, provinsi Maluku Utara. Kelurahan ini berada di pulau Tidore antara 0°66'11.00" LU dan 127°43'34.2" BT. Luas wilayah kelurahan ini adalah 1,78 km². Jarak dari kantor kecamatan ke kelurahan Soasio adalah 2 km. batas wilayah kelurahan Soasio adalah sebelah utara berbatasan Kelurahan Gamtufkange, sebelah barat Berbatasan kelurahan Tambula, sebelah timur berbatasan laut Halmahera dan sebelah selatan berbatasan Kelurahan Soadara.

Dari sisi sejarah Soasio pernah menjadi ibu kota dari Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Irian Barat (sekarang Papua) dari tahun 1956 sampai pada tahun 1962. Pada saat terbentuknya Kota Tidore Kepulauan yang merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah, sejak tanggal 31 Mei 2003 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003, Kelurahan Soasio menjadi ibukota Kota Tidore Kepulauan.

Wilayah administrasi kelurahan Soasio terdiri atas 9 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1570 jiwa, yang terdiri dari lak-laki 740 jiwa dan perempuan 830 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 491 KK. Komposisi Penduduk kelurahan Soasio berdasarkan mata pencarian, terdiri dari PNS 264 jiwa, Nelayan 27 jiwa, Petani 7 Pedagang 57.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, berdasarkan data kantor kelurahan, terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) yg tersebar pada 4 RW, yakni RW 01 sebanyak 13 KK, RW 02 sebanyak 7 KK, RW 03 sebanyak 8 KK dan RW 04 sebanyak 11 KK.

Komunikasi dan sosialisasi dalam Implementasi Permensos No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Soasio.

Peran komunikasi dalam penyampaian kebijakan sangatlah penting, karena kebijakan tersebut harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana atau pengguna. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dan disebarakan dengan cara yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pedoman Umum BPNT Tahun 2019 menyatakan bahwa program BPNT harus disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik agar terjadi aliran informasi, pembelajaran, dan komunikasi di antara para pelaksana di pusat dan daerah, LSM, media, akademisi, serta masyarakat dan peserta BPNT/KPM, terutama di wilayah yang sedang menerapkan program tersebut. Sosialisasi BPNT yang merata dan luas kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, telah dikembangkan strategi komprehensif untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan BPNT.

Semua informan yang diwawancarai baik dari pemerintah maupun penerima manfaat

telah mengetahui dan memahami bantuan sosial BPNT sesuai dengan Program Permensos No. 20 Tahun 2019. Hal ini didapat melalui pengkajian, sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos dan Pemerintah Setempat. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana didapat dari pengkajian PERMENSOS dan PENDUM sedangkan pemahaman penerima manfaat didapat dari sosialisasi di Kantor Kelurahan.

Sumber Daya Dalam Implementasi Permensos No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Soasio.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka. Hal ini diharapkan dapat memberikan nutrisi yang seimbang dan bantuan pangan yang tepat sasaran dan waktu. Untuk mencapai tujuan ini, peran dan fungsi dari sumber daya seperti e-Warong, Kartu Kombo (KKS dan kartu ATM), mesin EDC serta pendampingan dari kelurahan dan kecamatan harus dimaksimalkan.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan informan, semua fasilitas yang disediakan mendukung penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Contohnya adalah toko di pasar Sarimalaha yang bekerja sama dengan pelaksana BPNT untuk menjadi E-warong. Toko ini menyediakan EDC dan barang sehingga penerima manfaat dapat mengambil barang kebutuhan dengan menggesek kartu di mesin EDC.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pendukung untuk keluarga penerima BPNT di Kelurahan Soasio. Proses pendampingan yang dilakukan oleh Tim Kordinasi Bansos setempat berjalan dengan baik dalam verifikasi data, sosialisasi, pendampingan dan pemantauan saat penyaluran BPNT di Kelurahan Soasio.

Disiplin/Sikap (Disposisi) Pihak Pelaksana dan Pemerintah Setempat Dalam Proses Penyaluran BPNT di Kelurahan Soasio.

Dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pelayanan yang baik dan sikap ramah dari pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat dibutuhkan. Masyarakat miskin yang menjadi peserta program BPNT dapat mengadukan keluhan atau kendala kepada pelaksana setempat untuk dicarikan solusi.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah meliputi koordinasi lintas pelaksana dan pendamping, penyediaan tempat untuk pendistribusian sesuai jadwal yang disepakati bersama, mobilisasi KPM dalam mendistribusikan sesuai jadwal yang disepakati, memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasi, sosialisasi program kepada masyarakat khususnya KPM, pemantauan pelaksanaan program dan fasilitasi pelaksanaan musyawara Desa/Kelurahan untuk penyiapan data penerima manfaat program. Sikap pelaksana telah sesuai dengan kapasitas dan tugas yang diemban sehingga setiap ada masalah maka pendamping maupun petugas selalu memberikan solusi dan bijak dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi.

Deskripsi Struktur Birokrasi dalam Proses Implementasi Program BPNT di Kelurahan Soasio.

Struktur organisasi mempengaruhi implementasi kebijakan melalui mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme meliputi standart operation procedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi implementator agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi dapat melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam proses pelaksanaan penyaluran BPNT di Kelurahan Soasio, semua pihak turut serta memantau jalannya penyaluran tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain pemerintah setempat, tim koordinasi tingkat kecamatan, dan pemerintah Kota. Semua pihak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkomunikasi secara teratur mengenai proses penyaluran BPNT.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan informan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada PERMENSOS No. 20 Tahun 2019 secara kelembagaan. Selain itu, untuk pelaksanaan teknisnya, harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Deskripsi Bentuk Implementasi Program BPNT di Kelurahan Soasio.

Tujuan dari pemberian bantuan sosial non tunai adalah untuk membantu program penanggulangan kemiskinan, yang mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk non tunai seperti beras, gula, susu, telur, minyak goreng dan lain-lain dianggap lebih efisien karena dapat disalurkan tepat sasaran, jumlah yang sesuai, waktu yang tepat, dengan kualitas yang baik, serta administrasi yang tepat.

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan berupa sembako yang telah disediakan di E-Warong, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengambilnya dengan cara membelanjakan uang bantuan yang telah ditransfer langsung ke Kartu ATM. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah jumlah bantuan sesuai dengan jumlah yang tertera pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditemukan bahwa jumlah bantuan sudah sesuai dengan jumlah yang tertera pada pedoman tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengurangi atau menambah jumlah bantuan secara sembarangan karena bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima

dengan nilai sebesar Rp110.000 yang saat ini naik menjadi Rp.200.000. Tugas pemerintah hanya melakukan pendampingan.

Menurut Pedoman Umum BPNT 2019, peserta BPNT memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi. Dengan terpenuhinya gizi yang seimbang akan menciptakan generasi berkualitas di masa depan yang menjadi SDM yang dibutuhkan oleh negara. Bantuan ini juga dapat membantu mengurangi biaya hidup masyarakat miskin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah merasa bantuan BPNT cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun KPM merasa bantuan yang diberikan masih sangat kecil sehingga harus menambahkan uang pribadi untuk membeli beras sekarang. Meski demikian, KMP tetap bersyukur dengan adanya bantuan ini.

Bantuan ini hanya membantu pemenuhan pangan dan tidak berdampak pada kesejahteraan KPM sendiri, sehingga mereka tidak merasa kualitas hidup mereka meningkat, walaupun menurut pemerintah hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup.

Faktor Kendala Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Soasio.

Proses implementasi kebijakan tidak lepas dari faktor penghambat. Ini juga berlaku untuk Program BPNT yang ditangani oleh Tim Koordinasi program di setiap wilayah. Mereka juga mengalami masalah-masalah yang terkait dengan implementasi program.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi PERMENSOS No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT adalah data warga yang tidak akurat sehingga KPM yang berhak belum mendapatkan bantuan, saldo kartu KPM yang

kosong dan ketersediaan bahan pangan di E-Warong yang ditetapkan belum memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyaluran BPNT di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan BPNT yaitu jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu yang tepat meskipun belum optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kesulitan dalam memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih belum tepat sasaran. Selain itu, waktu penyaluran program BPNT yang direncanakan untuk diberikan setiap bulan kepada KPM masih sering mengalami keterlambatan dikarenakan pencairan dana dari pusat yang tidak menentu sehingga ketepatan waktu dari program BPNT belum efisien dan maksimal. Selain itu, terdapat juga gangguan teknis pada E-warong seperti kehabisan stok dan gangguan jaringan.

Saran

1. Dalam melakukan survey langsung di lapangan dan mengupdate data, petugas harus berperilaku secara profesional guna meningkatkan ketepatan sasaran dan validitas data.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran BPNT dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

3. Perlu dilakukan perbaikan pada sistem jaringan dan penambahan stok kebutuhan pangan yang tersedia di E-Warong.
4. Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat perlu ditingkatkan agar tujuan dari program BPNT untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baharuddin, Ilfan dan Yusuf Kamis. 2021. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1.
- [2] Akmal, Imal Alimah. 2020. *Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Skripsi: Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [3] Djaenal, Rifani. J. E. Kaawoan dan Ismail Rachman. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore*. *Jurnal governance* Vol.1, no. 2, 2021. ISSN: 2088-2815.
- [4] Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [5] Hidayat, Agung Srihadi. 2022. *Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi: Universitas Islam Malang Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Malang.
- [6] Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- [7] Nugroho, Riant. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [8] Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- [9] Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung
- [10] Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN